



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelola keuangan desa.
15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa di Desa;
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pedoman Pengelolaan ADD meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Demak.
- (3) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

#### Pasal 5

- (1) ADD di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp100.668.231.000,00 (seratus milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (2) Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) terdiri dari Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM), dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. 48,49% (empat puluh delapan koma empat puluh sembilan perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp48.813.000.000,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP);
  - b. 31,51% (tiga puluh satu koma lima satu perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp31.721.584.800,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan
  - c. 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp20.133.646.200,00 (dua puluh milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Rincian besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGGUNAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Penggunaan ADD adalah untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja lainnya yang terdiri dari :
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. Belanja Tak Terduga.

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 48,49% (empat puluh delapan koma empat puluh sembilan perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp48.813.000.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. perhitungan penghasilan tetap berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap Desa, dengan ketentuan Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan
  - c. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
    1. Kepala desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Sekretaris desa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    3. Perangkat desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
  - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - b. Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Belanja Lainnya

Pasal 8

Pengalokasian ADD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk belanja lainnya digunakan untuk:

- a. biaya operasional Pemerintah Desa;
- b. tunjangan BPD;
- c. tunjangan Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. insentif RT dan RW;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa, kependudukan, dan keluarga berencana;
- f. Sistem Informasi Desa (SID);
- g. peningkatan Kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Desa;
- h. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. pembangunan /perbaikan prasarana dan sarana publik;
- j. pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana Pemerintah Desa;
- k. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
- l. pembangunan/perbaikan lingkungan, permukiman dan rumah tidak layak huni;
- m. teknologi tepat guna;
- n. pembangunan/perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan;
- o. pengembangan sosial budaya dan adat istiadat;
- p. kegiatan peningkatan sumber daya manusia;
- q. operasional madrasah diniyah yang ada di desa dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak;
- r. sarana prasarana bencana alam; dan
- s. belanja tak terduga.

Pasal 9

Penggunaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan musyawarah desa.

## Pasal 10

Penyaluran ADD Tahun 2017 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Pengelola ADD terdiri dari:
  - a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Pembiayaan Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Tim Pembina tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dianggarkan di masing-masing kecamatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing desa.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Pasal 14

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
  - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD; dan
  - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dari Kepala Desa ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan dari Desa di wilayahnya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.

### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 18

- (1) Bagi Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (4) Dalam hal pada Tahun Anggaran 2017 masih terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar SiLPA Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA  
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33.21.01</b>	<b>Mranggen</b>		<b>4,329,000,000</b>	<b>2,213,819,840</b>	<b>2,480,288,523</b>	<b>9,023,108,364</b>	<b>9,023,081,000</b>
33.21.01.2001		1 Banyumeneng	276,000,000	121,175,467	130,541,501.23	527,716,968	527,716,000
33.21.01.2002		2 Kebonbatur	276,000,000	221,639,772	130,541,501.23	628,181,273	628,181,000
33.21.01.2003		3 Sumberrejo	291,000,000	147,957,344	130,541,501.23	569,498,846	569,498,000
33.21.01.2004		4 Kalitengah	171,000,000	78,192,023	130,541,501.23	379,733,524	379,733,000
33.21.01.2005		5 Kangkung	186,000,000	135,667,052	130,541,501.23	452,208,553	452,208,000
33.21.01.2006		6 Mranggen	171,000,000	148,591,463	130,541,501.23	450,132,964	450,132,000
33.21.01.2007		7 Batursari	306,000,000	367,976,262	130,541,501.23	804,517,763	<b>804,501,000</b>
33.21.01.2008		8 Bandungrejo	201,000,000	90,959,838	130,541,501.23	422,501,339	422,501,000
33.21.01.2009		9 Brumbung	171,000,000	78,849,346	130,541,501.23	380,390,847	380,390,000
33.21.01.2010		10 Kembangarum	336,000,000	122,815,203	130,541,501.23	589,356,704	589,356,000
33.21.01.2011		11 Karangsono	231,000,000	92,933,918	130,541,501.23	454,475,419	454,475,000
33.21.01.2012		12 Tamansari	201,000,000	62,456,470	130,541,501.23	393,997,971	393,997,000
33.21.01.2013		13 Ngemplak	171,000,000	51,085,863	130,541,501.23	352,627,364	352,627,000
33.21.01.2014		14 Menur	231,000,000	71,256,126	130,541,501.23	432,797,627	432,797,000
33.21.01.2015		15 jamus	246,000,000	69,196,945	130,541,501.23	445,738,447	445,738,000
33.21.01.2016		16 Wringinajar	231,000,000	119,698,709	130,541,501.23	481,240,210	481,240,000
33.21.01.2017		17 Waru	171,000,000	56,797,483	130,541,501.23	358,338,984	358,338,000
33.21.01.2018		18 Tegalarum	231,000,000	86,637,781	130,541,501.23	448,179,282	448,179,000
33.21.01.2019		19 Candisari	231,000,000	89,932,779	130,541,501.23	451,474,280	451,474,000
<b>33.21.02</b>	<b>Karangawen</b>		<b>3,072,000,000</b>	<b>1,666,556,745</b>	<b>1,566,498,015</b>	<b>6,305,054,760</b>	<b>6,305,049,000</b>
33.21.02.2001		1 Jragung	336,000,000	168,286,495	130,541,501.23	634,827,996	634,827,000
33.21.02.2002		2 Wonosekar	291,000,000	198,165,831	130,541,501.23	619,707,332	619,707,000
33.21.02.2003		3 Margohayu	186,000,000	113,625,437	130,541,501.23	430,166,939	430,166,000
33.21.02.2004		4 Teluk	171,000,000	79,728,899	130,541,501.23	381,270,400	381,270,000
33.21.02.2005		5 Tlogorejo	216,000,000	134,970,680	130,541,501.23	481,512,181	481,512,000
33.21.02.2006		6 Rejosari	321,000,000	206,123,939	130,541,501.23	657,665,440	657,665,000
33.21.02.2007		7 Karangawen	231,000,000	127,980,470	130,541,501.23	489,521,971	489,521,000
33.21.02.2008		8 Kuripan	231,000,000	116,680,849	130,541,501.23	478,222,350	478,222,000
33.21.02.2009		9 Bumirejo	246,000,000	101,275,663	130,541,501.23	477,817,164	477,817,000
33.21.02.2010		10 Brambang	291,000,000	178,647,647	130,541,501.23	600,189,148	600,189,000
33.21.02.2011		11 Sidorejo	291,000,000	127,761,907	130,541,501.23	549,303,409	549,303,000
33.21.02.2012		12 Pundenarum	261,000,000	113,308,928	130,541,501.23	504,850,429	504,850,000
<b>33.21.03</b>	<b>Guntur</b>		<b>3,855,000,000</b>	<b>1,557,796,303</b>	<b>2,610,830,025</b>	<b>8,023,626,328</b>	<b>8,023,615,000</b>
33.21.03.2001		1 Blerong	201,000,000	108,565,654	130,541,501.23	440,107,156	440,107,000
33.21.03.2002		2 Banjarejo	171,000,000	53,735,047	130,541,501.23	355,276,548	355,276,000
33.21.03.2003		3 Wonorejo	186,000,000	75,061,659	130,541,501.23	391,603,160	391,603,000
33.21.03.2004		4 Sarirejo	171,000,000	56,477,926	130,541,501.23	358,019,428	358,019,000
33.21.03.2005		5 Pamongan	171,000,000	55,844,424	130,541,501.23	357,385,925	357,385,000
33.21.03.2006		6 Tlogoweru	171,000,000	58,267,149	130,541,501.23	359,808,650	359,808,000
33.21.03.2007		7 Bogosari	246,000,000	132,214,266	130,541,501.23	508,755,767	508,755,000
33.21.03.2008		8 Sukorejo	171,000,000	66,512,386	130,541,501.23	368,053,887	368,053,000
33.21.03.2009		9 Sidokumpul	186,000,000	82,377,868	130,541,501.23	398,919,370	398,919,000
33.21.03.2010		10 Gaji	171,000,000	68,498,112	130,541,501.23	370,039,613	370,039,000
33.21.03.2011		11 Krandon	171,000,000	53,471,126	130,541,501.23	355,012,627	355,012,000
33.21.03.2012		12 Tangkis	171,000,000	55,247,442	130,541,501.23	356,788,943	356,788,000
33.21.03.2013		13 Temuroso	261,000,000	158,384,640	130,541,501.23	549,926,141	549,926,000
33.21.03.2014		14 Bakalrejo	246,000,000	111,895,258	130,541,501.23	488,436,759	488,436,000
33.21.03.2015		15 Guntur	231,000,000	77,916,496	130,541,501.23	439,457,997	439,457,000
33.21.03.2016		16 Bumiharjo	216,000,000	80,807,381	130,541,501.23	427,348,882	427,348,000
33.21.03.2017		17 Tlogorejo	171,000,000	51,281,518	130,541,501.23	352,823,019	352,823,000
33.21.03.2018		18 Trimulyo	186,000,000	100,203,730	130,541,501.23	416,745,232	416,745,000
33.21.03.2019		19 Sidoharjo	186,000,000	60,933,063	130,541,501.23	377,474,564	377,474,000
33.21.03.2020		20 Turitempel	171,000,000	50,101,159	130,541,501.23	351,642,660	351,642,000
<b>33.21.04</b>	<b>Sayung</b>		<b>4,740,000,000</b>	<b>1,844,260,459</b>	<b>2,610,830,025</b>	<b>9,195,090,484</b>	<b>9,195,079,000</b>
33.21.04.2001		1 Bulusari	231,000,000	58,808,181	130,541,501.23	420,349,682	420,349,000
33.21.04.2002		2 Dombo	171,000,000	60,751,747	130,541,501.23	362,293,248	362,293,000
33.21.04.2003		3 Jetaksari	186,000,000	81,326,962	130,541,501.23	397,868,463	397,868,000
33.21.04.2004		4 Kalisari	261,000,000	139,517,871	130,541,501.23	531,059,373	531,059,000
33.							

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.05.2011		11 Karangtowo	171,000,000	46,718,460	130,541,501.23	348,259,961	348,259,000
33.21.05.2012		12 Wonowoso	231,000,000	63,476,762	130,541,501.23	425,018,264	425,018,000
33.21.05.2013		13 Wonokerto	171,000,000	54,740,247	130,541,501.23	356,281,748	356,281,000
33.21.05.2014		14 Batu	231,000,000	78,250,643	130,541,501.23	439,792,144	439,792,000
33.21.05.2015		15 Rejosari	171,000,000	54,822,559	130,541,501.23	356,364,061	356,364,000
33.21.05.2016		16 Wonoagung	186,000,000	74,127,437	130,541,501.23	390,668,939	390,668,000
33.21.05.2017		17 Tambakbulusan	171,000,000	63,344,604	130,541,501.23	364,886,106	364,886,000
<b>33.21.06</b>	<b>Wonosalam</b>		<b>3,786,000,000</b>	<b>1,351,835,636</b>	<b>2,741,371,526</b>	<b>7,879,207,162</b>	<b>7,879,197,000</b>
33.21.06.2001		1 Doreng	171,000,000	64,772,162	130,541,501.23	366,313,663	366,313,000
33.21.06.2002		2 Kalianyar	171,000,000	66,134,755	130,541,501.23	367,676,256	367,676,000
33.21.06.2003		3 Tlogodowo	171,000,000	38,169,688	130,541,501.23	339,711,189	339,711,000
33.21.06.2004		4 Karangrowo	186,000,000	79,071,714	130,541,501.23	395,613,216	395,613,000
33.21.06.2005		5 Lempuyang	171,000,000	44,349,786	130,541,501.23	345,891,287	345,891,000
33.21.06.2006		6 Kendaldoyong	171,000,000	57,791,958	130,541,501.23	359,333,459	359,333,000
33.21.06.2007		7 Wonosalam	171,000,000	69,501,363	130,541,501.23	371,042,865	371,042,000
33.21.06.2008		8 Karangrejo	171,000,000	63,924,351	130,541,501.23	365,465,853	365,465,000
33.21.06.2009		9 Jogoloyo	171,000,000	72,755,814	130,541,501.23	374,297,315	374,297,000
33.21.06.2010		10 Botorejo	171,000,000	71,929,572	130,541,501.23	373,471,073	373,471,000
33.21.06.2011		11 sidomulyo	171,000,000	74,128,966	130,541,501.23	375,670,467	375,670,000
33.21.06.2012		12 pilangrejo	186,000,000	90,156,207	130,541,501.23	406,697,708	406,697,000
33.21.06.2013		13 Tlogorejo	171,000,000	65,132,836	130,541,501.23	366,674,337	366,674,000
33.21.06.2014		14 Kerangkulon	201,000,000	68,545,690	130,541,501.23	400,087,192	400,087,000
33.21.06.2015		15 Bunderan	171,000,000	42,171,271	130,541,501.23	343,712,772	343,712,000
33.21.06.2016		16 Getas	201,000,000	79,031,927	130,541,501.23	410,573,428	410,573,000
33.21.06.2017		17 Mojodemak	171,000,000	70,782,428	130,541,501.23	372,323,929	372,323,000
33.21.06.2018		18 Kuncir	231,000,000	65,059,785	130,541,501.23	426,601,286	426,601,000
33.21.06.2019		19 Trengguli	186,000,000	65,023,013	130,541,501.23	381,564,514	381,564,000
33.21.06.2020		20 Mrisen	171,000,000	50,035,145	130,541,501.23	351,576,646	351,576,000
33.21.06.2021		21 Mranak	201,000,000	53,367,206	130,541,501.23	384,908,708	384,908,000
<b>33.21.07</b>	<b>Dempet</b>		<b>3,201,000,000</b>	<b>1,205,573,455</b>	<b>2,088,664,020</b>	<b>6,495,237,475</b>	<b>6,495,231,000</b>
31.21.07.2001		1 Merak	201,000,000	73,079,098	130,541,501.23	404,620,599	404,620,000
31.21.07.2002		2 Karangrejo	186,000,000	48,365,531	130,541,501.23	364,907,032	364,907,000
31.21.07.2003		3 Dempet	216,000,000	94,838,744	130,541,501.23	441,380,245	441,380,000
31.21.07.2004		4 Botosengon	171,000,000	54,429,987	130,541,501.23	355,971,488	355,971,000
31.21.07.2005		5 jerukgulung	186,000,000	53,929,310	130,541,501.23	370,470,811	370,470,000
31.21.07.2006		6 Kunir	231,000,000	94,958,048	130,541,501.23	456,499,549	456,499,000
31.21.07.2007		7 Brakas	171,000,000	79,267,064	130,541,501.23	380,808,565	380,808,000
31.21.07.2008		8 balerejo	231,000,000	89,367,564	130,541,501.23	450,909,065	450,909,000
31.21.07.2009		9 Baleromo	171,000,000	77,204,031	130,541,501.23	378,745,533	378,745,000
31.21.07.2010		10 Kedunggori	201,000,000	71,046,542	130,541,501.23	402,588,043	402,588,000
31.21.07.2011		11 kuwu	171,000,000	75,449,959	130,541,501.23	376,991,460	376,991,000
31.21.07.2012		12 Kebonsari	171,000,000	47,476,825	130,541,501.23	349,018,326	349,018,000
31.21.07.2013		13 Gempoldenok	171,000,000	36,763,909	130,541,501.23	338,305,410	338,305,000
31.21.07.2014		14 Sidomulyo	246,000,000	94,272,561	130,541,501.23	470,814,062	470,814,000
31.21.07.2015		15 Harjowinangun	246,000,000	91,949,293	130,541,501.23	468,490,794	468,490,000
31.21.07.2016		16 Kramat	231,000,000	123,174,989	130,541,501.23	484,716,491	484,716,000
<b>33.21.08</b>	<b>Gajah</b>		<b>3,138,000,000</b>	<b>948,874,192</b>	<b>2,349,747,022</b>	<b>6,436,621,215</b>	<b>6,436,614,000</b>
33.21.08.2001		1 Surodadi	171,000,000	34,430,368	130,541,501.23	335,971,869	335,971,000
33.21.08.2002		2 Jatisono	171,000,000	48,749,673	130,541,501.23	350,291,175	350,291,000
33.21.08.2003		3 Kedondong	171,000,000	81,357,928	130,541,501.23	382,899,429	382,899,000
33.21.08.2004		4 Gedangalas	171,000,000	62,141,242	130,541,501.23	363,682,744	363,682,000
33.21.08.2005		5 Sambiroto	171,000,000	33,107,770	130,541,501.23	334,649,272	334,649,000
33.21.08.2006		6 Tanjunganyar	171,000,000	59,842,673	130,541,501.23	361,384,174	361,384,000
33.21.08.2007		7 Wilalung	171,000,000	56,115,595	130,541,501.23	357,657,096	357,657,000
33.21.08.2008		8 Medini	171,000,000	57,914,931	130,541,501.23	359,456,433	359,456,000
33.21.08.2009		9 Mlatiharjo	201,000,000	51,283,785	130,541,501.23	382,825,286	382,825,000
33.21.08.2010		10 Tambirejo	171,000,000	50,636,685	130,541,501.23	352,178,187	352,178,000
33.21.08.2011		11 Banjarsari	171,000,000	66,637,148	130,541,501.23	368,178,649	368,178,000
33.21.08.2012		12 Boyolali	171,000,000	29,726,647	130,541,501.23	331,268,148	331,268,000
33.21.08.2013		13 Gajah	171,000,000	57,011,891	130,541,501.23	358,553,392	358,553,000
33.21.08.2014		14 Sari	171,000,000	69,121,871	130,541,501.23	370,663,372	370,663,000
33.21.0							

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	ADD SILTAP	ADD-P	ADD-M	ADDx	PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33.21.10.2015		15 Gempolsongo	171,000,000	36,213,665	130,541,501.23	337,755,166	337,755,000
<b>33.21.11</b>	<b>Demak</b>		<b>2,598,000,000</b>	<b>1,109,977,063</b>	<b>1,697,039,516</b>	<b>5,405,016,579</b>	<b>5,405,011,000</b>
33.21.11.2001		1 Bolo	171,000,000	59,697,140	130,541,501.23	361,238,641	361,238,000
33.21.11.2002		2 Bango	186,000,000	99,381,016	130,541,501.23	415,922,517	415,922,000
33.21.11.2003		3 Kedondong	171,000,000	72,493,685	130,541,501.23	374,035,186	374,035,000
33.21.11.2004		4 Sedo	201,000,000	58,918,926	130,541,501.23	390,460,428	390,460,000
33.21.11.2005		5 Mulyorejo	201,000,000	72,449,538	130,541,501.23	403,991,039	403,991,000
33.21.11.2006		6 Turirejo	261,000,000	183,293,379	130,541,501.23	574,834,881	574,834,000
33.21.11.2007		7 Raji	201,000,000	91,906,630	130,541,501.23	423,448,131	423,448,000
33.21.11.2008		8 Cabean	201,000,000	104,835,275	130,541,501.23	436,376,777	436,376,000
33.21.11.2009		9 Tempuran	201,000,000	64,762,628	130,541,501.23	396,304,130	396,304,000
33.21.11.2010		10 Karangmlati	186,000,000	63,186,569	130,541,501.23	379,728,070	379,728,000
33.21.11.2011		11 Katonsari	186,000,000	77,917,309	130,541,501.23	394,458,810	394,458,000
33.21.11.2012		12 Kalikondang	231,000,000	89,902,951	130,541,501.23	451,444,452	451,444,000
33.21.11.2013		13 Donorojo	201,000,000	71,232,016	130,541,501.23	402,773,518	402,773,000
<b>33.21.12</b>	<b>Bonang</b>		<b>4,431,000,000</b>	<b>2,167,022,147</b>	<b>2,741,371,526</b>	<b>9,339,393,673</b>	<b>9,339,383,000</b>
33.21.12.2001		1 Jatimulyo	201,000,000	71,070,160	130,541,501.23	402,611,662	402,611,000
33.21.12.2002		2 Krajanbogo	246,000,000	78,867,873	130,541,501.23	455,409,374	455,409,000
33.21.12.2003		3 Sukodono	216,000,000	64,011,509	130,541,501.23	410,553,010	410,553,000
33.21.12.2004		4 Sumberejo	381,000,000	146,435,346	130,541,501.23	657,976,847	657,976,000
33.21.12.2005		5 Kembangan	201,000,000	73,860,511	130,541,501.23	405,402,013	405,402,000
33.21.12.2006		6 Karangrejo	216,000,000	124,145,029	130,541,501.23	470,686,530	470,686,000
33.21.12.2007		7 Gebangarum	186,000,000	65,589,845	130,541,501.23	382,131,346	382,131,000
33.21.12.2008		8 Gebang	201,000,000	103,844,767	130,541,501.23	435,386,269	435,386,000
33.21.12.2009		9 Margolinduk	171,000,000	70,660,464	130,541,501.23	372,201,965	372,201,000
33.21.12.2010		10 Morodemak	171,000,000	134,141,302	130,541,501.23	435,682,803	435,682,000
33.21.12.2011		11 Purworejo	201,000,000	217,674,190	130,541,501.23	549,215,691	549,215,000
33.21.12.2012		12 Betahwalang	171,000,000	130,251,581	130,541,501.23	431,793,082	431,793,000
33.21.12.2013		13 Serangan	171,000,000	95,664,851	130,541,501.23	397,206,352	397,206,000
33.21.12.2014		14 Tridonorejo	231,000,000	143,367,495	130,541,501.23	504,908,996	504,908,000
33.21.12.2015		15 Tlogoboyo	171,000,000	97,499,143	130,541,501.23	399,040,644	399,040,000
33.21.12.2016		16 Jatirogo	171,000,000	96,955,340	130,541,501.23	398,496,841	398,496,000
33.21.12.2017		17 Bonangrejo	201,000,000	57,696,366	130,541,501.23	389,237,867	389,237,000
33.21.12.2018		18 Poncoharjo	291,000,000	97,916,149	130,541,501.23	519,457,651	519,457,000
33.21.12.2019		19 Wonosari	171,000,000	85,773,860	130,541,501.23	387,315,361	387,315,000
33.21.12.2020		20 Jali	216,000,000	70,606,627	130,541,501.23	417,148,128	417,148,000
33.21.12.2021		21 Weding	246,000,000	140,989,739	130,541,501.23	517,531,240	517,531,000
<b>33.21.13</b>	<b>Wedung</b>		<b>3,705,000,000</b>	<b>1,779,542,709</b>	<b>2,610,830,025</b>	<b>8,095,372,734</b>	<b>8,095,363,000</b>
33.21.12.2001		1 Wedung	246,000,000	197,785,270	130,541,501.23	574,326,771	574,326,000
33.21.12.2002		2 Ngawen	171,000,000	47,865,309	130,541,501.23	349,406,810	349,406,000
33.21.12.2003		3 Ruwit	171,000,000	84,665,157	130,541,501.23	386,206,658	386,206,000
33.21.12.2004		4 Kenduren	231,000,000	118,339,209	130,541,501.23	479,880,711	479,880,000
33.21.12.2005		5 Buko	186,000,000	88,063,821	130,541,501.23	404,605,323	404,605,000
33.21.12.2006		6 Mandung	171,000,000	34,967,613	130,541,501.23	336,509,115	336,509,000
33.21.12.2007		7 Berahan Kulon	171,000,000	63,129,834	130,541,501.23	364,671,335	364,671,000
33.21.12.2008		8 Berahan Wetan	261,000,000	163,611,769	130,541,501.23	555,153,271	555,153,000
33.21.12.2009		9 Bungo	201,000,000	110,741,823	130,541,501.23	442,283,324	442,283,000
33.21.12.2010		10 Tempel	171,000,000	59,518,347	130,541,501.23	361,059,849	361,059,000
33.21.12.2011		11 Jetak	171,000,000	78,890,973	130,541,501.23	380,432,474	380,432,000
33.21.12.2012		12 Jungsemi	171,000,000	67,198,255	130,541,501.23	368,739,756	368,739,000
33.21.12.2013		13 Jungpasir	171,000,000	89,083,011	130,541,501.23	390,624,513	390,624,000
33.21.12.2014		14 Mutihwetan	171,000,000	51,452,716	130,541,501.23	352,994,218	352,994,000
33.21.12.2015		15 Babalan	171,000,000	140,351,512	130,541,501.23	441,893,013	441,893,000
33.21.12.2016		16 Mutihkulon	186,000,000	96,212,751	130,541,501.23	412,754,252	412,754,000
33.21.12.2017		17 Tedunan	171,000,000	74,143,975	130,541,501.23	375,685,476	375,685,000
33.21.12.2018		18 Kendalasem	171,000,000	57,533,412	130,541,501.23	359,074,914	359,074,000
33.21.12.2019		19 Kedungmutih	171,000,000	88,516,337	130,541,501.23	390,057,838	390,057,000
33.21.12.2020		20 Kedungkarang	171,000,000	67,471,615	130,541,501.23	369,013,116	369,013,000
<b>33.21.14</b>	<b>Kebonagung</b>		<b>2,574,000,000</b>	<b>788,123,746</b>	<b>1,827,581,017</b>	<b>5,189,704,763</b>	<b>5,189,832,000</b>
33.21.12.2001		1 Pilagwetan	171,000,000	37,829,207	130,541,501.23	339,370,709	339,370,000
33.21.12.2002		2 Kebonagug	216,000,000	77,426,188	130,541,501.23	423,967,689	

RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
1	2	3	8		
<b>33.21.01 Mranggen</b>			<b>9,023,081,000</b>	5,413,848,600	3,609,232,400
33.21.01.2001	1 Banyumeneng	527,716,000	316,629,600	211,086,400	
33.21.01.2002	2 Kebonbatur	628,181,000	376,908,600	251,272,400	
33.21.01.2003	3 Sumberrejo	569,498,000	341,698,800	227,799,200	
33.21.01.2004	4 Kalitengah	379,733,000	227,839,800	151,893,200	
33.21.01.2005	5 Kangkung	452,208,000	271,324,800	180,883,200	
33.21.01.2006	6 Mranggen	450,132,000	270,079,200	180,052,800	
33.21.01.2007	7 Batursari	804,501,000	482,700,600	321,800,400	
33.21.01.2008	8 Bandungrejo	422,501,000	253,500,600	169,000,400	
33.21.01.2009	9 Brumbung	380,390,000	228,234,000	152,156,000	
33.21.01.2010	10 Kembangarum	589,356,000	353,613,600	235,742,400	
33.21.01.2011	11 Karangsono	454,475,000	272,685,000	181,790,000	
33.21.01.2012	12 Tamansari	393,997,000	236,398,200	157,598,800	
33.21.01.2013	13 Ngemplak	352,627,000	211,576,200	141,050,800	
33.21.01.2014	14 Menur	432,797,000	259,678,200	173,118,800	
33.21.01.2015	15 jamus	445,738,000	267,442,800	178,295,200	
33.21.01.2016	16 Wringinjajar	481,240,000	288,744,000	192,496,000	
33.21.01.2017	17 Waru	358,338,000	215,002,800	143,335,200	
33.21.01.2018	18 Tegalarum	448,179,000	268,907,400	179,271,600	
33.21.01.2019	19 Candisari	451,474,000	270,884,400	180,589,600	
<b>33.21.02 Karangawen</b>			<b>6,305,049,000</b>	3,783,029,400	2,522,019,600
33.21.02.2001	1 Jragung	634,827,000	380,896,200	253,930,800	
33.21.02.2002	2 Wonosekar	619,707,000	371,824,200	247,882,800	
33.21.02.2003	3 Margohayu	430,166,000	258,099,600	172,066,400	
33.21.02.2004	4 Teluk	381,270,000	228,762,000	152,508,000	
33.21.02.2005	5 Tlogorejo	481,512,000	288,907,200	192,604,800	
33.21.02.2006	6 Rejosari	657,665,000	394,599,000	263,066,000	
33.21.02.2007	7 Karangawen	489,521,000	293,712,600	195,808,400	
33.21.02.2008	8 Kuripan	478,222,000	286,933,200	191,288,800	
33.21.02.2009	9 Bumirejo	477,817,000	286,690,200	191,126,800	
33.21.02.2010	10 Brambang	600,189,000	360,113,400	240,075,600	
33.21.02.2011	11 Sidorejo	549,303,000	329,581,800	219,721,200	
33.21.02.2012	12 Pundenarum	504,850,000	302,910,000	201,940,000	
<b>33.21.03 Guntur</b>			<b>8,023,615,000</b>	4,814,169,000	3,209,446,000
33.21.03.2001	1 Blerong	440,107,000	264,064,200	176,042,800	
33.21.03.2002	2 Banjarejo	355,276,000	213,165,600	142,110,400	
33.21.03.2003	3 Wonorejo	391,603,000	234,961,800	156,641,200	
33.21.03.2004	4 Sarirejo	358,019,000	214,811,400	143,207,600	
33.21.03.2005	5 Pamongan	357,385,000	214,431,000	142,954,000	
33.21.03.2006	6 Tlogoweru	359,808,000	215,884,800	143,923,200	
33.21.03.2007	7 Bogosari	508,755,000	305,253,000	203,502,000	
33.21.03.2008	8 Sukorejo	368,053,000	220,831,800	147,221,200	
33.21.03.2009	9 Sidokumpul	398,919,000	239,351,400	159,567,600	
33.21.03.2010	10 Gaji	370,039,000	222,023,400	148,015,600	
33.21.03.2011	11 Krandon	355,012,000	213,007,200	142,004,800	
33.21.03.2012	12 Tangkis	356,788,000	214,072,800	142,715,200	
33.21.03.2013	13 Temuroso	549,926,000	329,955,600	219,970,400	
33.21.03.2014	14 Bakalrejo	488,436,000	293,061,600	195,374,400	
33.21.03.2015	15 Guntur	439,457,000	263,674,200	175,782,800	
33.21.03.2016	16 Bumiharjo	427,348,000	256,408,800	170,939,200	
33.21.03.2017	17 Tlogorejo	352,823,000	211,693,800	141,129,200	
33.21.03.2018	18 Trimulyo	416,745,000	250,047,000	166,698,000	
33.21.03.2019	19 Sidoharjo	377,474,000	226,484,400	150,989,600	
33.21.03.2020	20 Turitempel	351,642,000	210,985,200	140,656,800	
<b>33.21.04 Sayung</b>			<b>9,195,079,000</b>	5,517,047,400	3,678,031,600
33.21.04.2001	1 Bulusari	420,349,000	252,209,400	168,139,600	
33.21.04.2002	2 Dombo	362,293,000	217,375,800	144,917,200	
33.21.04.2003	3 Jetaksari	397,868,000	238,720,800	159,147,200	
33.21.04.2004	4 Kalisari	531,059,000	318,635,400	212,423,600	
33.21.04.2005	5 Karangasem	369,060,000	221,436,000	147,624,000	
33.21.04.2006	6 Prampelan	412,830,000	247,698,000	165,132,000	
33.21.04.2007	7 Pilangsari	366,333,000	219,799,800	146,533,200	
33.21.04.2008	8 Tambakroto	388,279,000	232,967,400	155,311,600	
33.21.04.2009	9 Loireng	460,113,000	276,067,800	184,045,200	
33.21.04.2010	10 Sayung	576,806,000	346,083,600	230,722,400	
33.21.04.2011	11 Sriwulan	464,380,000	278,628,000	185,752,000	
33.21.04.2012	12 Bedono	535,861,000	321,516,600	214,344,400	
33.21.04.2013	13 Purwosari	458,429,000	275,057,400	183,371,600	
33.21.04.2014	14 Sidogemah	527,782,000	316,669,200	211,112,800	
33.21.04.2015	15 Gemulak	485,727,000	291,436,200	194,290,800	
33.21.04.2016	16 Timbulsloko	452,904,000	271,742,400	181,161,600	

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
33.21.04.2017	17 Surodadi	381,899,000	229,139,400	152,759,600	
33.21.04.2018	18 Tugu	525,262,000	315,157,200	210,104,800	
33.21.04.2019	19 Sidorejo	572,163,000	343,297,800	228,865,200	
33.21.04.2020	20 Banjarsari	505,682,000	303,409,200	202,272,800	
<b>33.21.05 Karangtengah</b>		<b>6,496,077,000</b>	3,897,646,200	2,598,430,800	
33.21.05.2001	1 Ploso	348,616,000	209,169,600	139,446,400	
33.21.05.2002	2 Grogol	370,236,000	222,141,600	148,094,400	
33.21.05.2003	3 Pulosari	360,123,000	216,073,800	144,049,200	
33.21.05.2004	4 Donorejo	437,462,000	262,477,200	174,984,800	
33.21.05.2005	5 Pidodo	391,698,000	235,018,800	156,679,200	
33.21.05.2006	6 Klitih	375,114,000	225,068,400	150,045,600	
33.21.05.2007	7 Sampang	416,682,000	250,009,200	166,672,800	
33.21.05.2008	8 Kedunguter	368,632,000	221,179,200	147,452,800	
33.21.05.2009	9 Dukun	367,030,000	220,218,000	146,812,000	
33.21.05.2010	10 Karangsari	379,216,000	227,529,600	151,686,400	
33.21.05.2011	11 Karangtowo	348,259,000	208,955,400	139,303,600	
33.21.05.2012	12 Wonowoso	425,018,000	255,010,800	170,007,200	
33.21.05.2013	13 Wonokerto	356,281,000	213,768,600	142,512,400	
33.21.05.2014	14 Batu	439,792,000	263,875,200	175,916,800	
33.21.05.2015	15 Rejosari	356,364,000	213,818,400	142,545,600	
33.21.05.2016	16 Wonoagung	390,668,000	234,400,800	156,267,200	
33.21.05.2017	17 Tambakbulusan	364,886,000	218,931,600	145,954,400	
<b>33.21.06 Wonosalam</b>		<b>7,879,197,000</b>	4,727,518,200	3,151,678,800	
33.21.06.2001	1 Doreng	366,313,000	219,787,800	146,525,200	
33.21.06.2002	2 Kalianyar	367,676,000	220,605,600	147,070,400	
33.21.06.2003	3 Tlogodowo	339,711,000	203,826,600	135,884,400	
33.21.06.2004	4 Karangrowo	395,613,000	237,367,800	158,245,200	
33.21.06.2005	5 Lempuyang	345,891,000	207,534,600	138,356,400	
33.21.06.2006	6 Kendaldoyong	359,333,000	215,599,800	143,733,200	
33.21.06.2007	7 Wonosalam	371,042,000	222,625,200	148,416,800	
33.21.06.2008	8 Karangrejo	365,465,000	219,279,000	146,186,000	
33.21.06.2009	9 Jogoloyo	374,297,000	224,578,200	149,718,800	
33.21.06.2010	10 Botorejo	373,471,000	224,082,600	149,388,400	
33.21.06.2011	11 sidomulyo	375,670,000	225,402,000	150,268,000	
33.21.06.2012	12 pilangrejo	406,697,000	244,018,200	162,678,800	
33.21.06.2013	13 Tlogorejo	366,674,000	220,004,400	146,669,600	
33.21.06.2014	14 Kerangkulon	400,087,000	240,052,200	160,034,800	
33.21.06.2015	15 Bunderan	343,712,000	206,227,200	137,484,800	
33.21.06.2016	16 Getas	410,573,000	246,343,800	164,229,200	
33.21.06.2017	17 Mojodemak	372,323,000	223,393,800	148,929,200	
33.21.06.2018	18 Kuncir	426,601,000	255,960,600	170,640,400	
33.21.06.2019	19 Trengguli	381,564,000	228,938,400	152,625,600	
33.21.06.2020	20 Mrisen	351,576,000	210,945,600	140,630,400	
33.21.06.2021	21 Mranak	384,908,000	230,944,800	153,963,200	
<b>31.21.07 Dempet</b>		<b>6,495,231,000</b>	3,897,138,600	2,598,092,400	
31.21.07.2001	1 Merak	404,620,000	242,772,000	161,848,000	
31.21.07.2002	2 Karangrejo	364,907,000	218,944,200	145,962,800	
31.21.07.2003	3 Dempet	441,380,000	264,828,000	176,552,000	
31.21.07.2004	4 Botosengon	355,971,000	213,582,600	142,388,400	
31.21.07.2005	5 jerukgulung	370,470,000	222,282,000	148,188,000	
31.21.07.2006	6 Kunir	456,499,000	273,899,400	182,599,600	
31.21.07.2007	7 Brakas	380,808,000	228,484,800	152,323,200	
31.21.07.2008	8 balerejo	450,909,000	270,545,400	180,363,600	
31.21.07.2009	9 Baleromo	378,745,000	227,247,000	151,498,000	
31.21.07.2010	10 Kedungori	402,588,000	241,552,800	161,035,200	
31.21.07.2011	11 kuwu	376,991,000	226,194,600	150,796,400	
31.21.07.2012	12 Kebonsari	349,018,000	209,410,800	139,607,200	
31.21.07.2013	13 Gempoldenok	338,305,000	202,983,000	135,322,000	
31.21.07.2014	14 Sidomulyo	470,814,000	282,488,400	188,325,600	
31.21.07.2015	15 Harjowinangun	468,490,000	281,094,000	187,396,000	
31.21.07.2016	16 Kramat	484,716,000	290,829,600	193,886,400	
<b>33.21.08 Gajah</b>		<b>6,436,614,000</b>	3,861,968,400	2,574,645,600	
33.21.08.2001	1 Surodadi	335,971,000	201,582,600	134,388,400	
33.21.08.2002	2 Jatisono	350,291,000	210,174,600	140,116,400	
33.21.08.2003	3 Kedondong	382,899,000	229,739,400	153,159,600	
33.21.08.2004	4 Gedangalas	363,682,000	218,209,200	145,472,800	
33.21.08.2005	5 Sambiroto	334,649,000	200,789,400	133,859,600	
33.21.08.2006	6 Tanjunganyar	361,384,000	216,830,400	144,553,600	
33.21.08.2007	7 Wilalung	357,657,000	214,594,200	143,062,800	
33.21.08.2008	8 Medini	359,456,000	215,673,600	143,782,400	
33.21.08.2009	9 Mlatiharjo	382,825,000	229,695,000	153,130,000	
33.21.08.2010	10 Tambirejo	352,178,000	211,306,800	140,871,200	
33.21.08.2011	11 Banjarsari	368,178,000	220,906,800	147,271,200	
33.21.08.2012	12 Boyolali	331,268,000	198,760,800	132,507,200	
33.21.08.2013	13 Gajah	358,553,000	215,131,800	143,421,200	
33.21.08.2014	14 Sari	370,663,000	222,397,800	148,265,200	
33.21.08.2015	15 Mlekang	388,754,000	233,252,400	155,501,600	
33.21.08.2016	16 Sambung	352,243,000	211,345,800	140,897,200	
33.21.08.2017	17 Tlogopandogan	347,754,000	208,652,400	139,101,600	
33.21.08.2018	18 Mojosimo	338,209,000	202,925,400	135,283,600	
<b>33.21.09 Karanganyar</b>		<b>6,963,669,000</b>	4,178,201,400	2,785,467,600	
33.21.09.2001	1 Jatirejo	441,804,000	265,082,400	176,721,600	
33.21.09.2002	2 Ngaluran	468,142,000	280,885,200	187,256,800	

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
33.21.09.2003	3 Wonoketingal	454,457,000	272,674,200	181,782,800	
33.21.09.2004	4 Cangkringrembang	394,880,000	236,928,000	157,952,000	
33.21.09.2005	5 Cangkring	448,578,000	269,146,800	179,431,200	
33.21.09.2006	6 Tuwang	397,957,000	238,774,200	159,182,800	
33.21.09.2007	7 Undaan Kidul	347,904,000	208,742,400	139,161,600	
33.21.09.2008	8 Undaan Lor	372,136,000	223,281,600	148,854,400	
33.21.09.2009	9 Ketanjung	393,562,000	236,137,200	157,424,800	
33.21.09.2010	10 Ngemplikwetan	347,142,000	208,285,200	138,856,800	
33.21.09.2011	11 Wonorejo	423,619,000	254,171,400	169,447,600	
33.21.09.2012	12 Karanganyar	404,715,000	242,829,000	161,886,000	
33.21.09.2013	13 Kedungwaru Kidul	452,199,000	271,319,400	180,879,600	
33.21.09.2014	14 Kedungwaru Lor	429,175,000	257,505,000	171,670,000	
33.21.09.2015	15 Bandungrejo	404,705,000	242,823,000	161,882,000	
33.21.09.2016	16 Tugu Lor	373,516,000	224,109,600	149,406,400	
33.21.09.2017	17 Kotaan	409,178,000	245,506,800	163,671,200	
<b>33.21.11 Mijen</b>		<b>5,821,030,000</b>	3,492,618,000	2,328,412,000	
33.21.10.2001	1 Geneng	365,855,000	219,513,000	146,342,000	
33.21.10.2002	2 Ngelowetan	352,037,000	211,222,200	140,814,800	
33.21.10.2003	3 Mlaten	492,926,000	295,755,600	197,170,400	
33.21.10.2004	4 Bantengmati	382,505,000	229,503,000	153,002,000	
33.21.10.2005	5 Ngelokulon	368,706,000	221,223,600	147,482,400	
33.21.10.2006	6 Pasir	528,419,000	317,051,400	211,367,600	
33.21.10.2007	7 Rejosari	402,600,000	241,560,000	161,040,000	
33.21.10.2008	8 Ngegot	345,828,000	207,496,800	138,331,200	
33.21.10.2009	9 Jleper	404,814,000	242,888,400	161,925,600	
33.21.10.2010	10 Pecuk	361,389,000	216,833,400	144,555,600	
33.21.10.2011	11 Tanggul	354,328,000	212,596,800	141,731,200	
33.21.10.2012	12 Bakung	411,218,000	246,730,800	164,487,200	
33.21.10.2013	13 Bremi	348,043,000	208,825,800	139,217,200	
33.21.10.2014	14 Mijen	364,607,000	218,764,200	145,842,800	
33.21.10.2015	15 Gempolsongo	337,755,000	202,653,000	135,102,000	
<b>33.21.11 Demak</b>		<b>5,405,011,000</b>	3,243,006,600	2,162,004,400	
33.21.11.2001	1 Bolo	361,238,000	216,742,800	144,495,200	
33.21.11.2002	2 Bango	415,922,000	249,553,200	166,368,800	
33.21.11.2003	3 Kedondong	374,035,000	224,421,000	149,614,000	
33.21.11.2004	4 Sedo	390,460,000	234,276,000	156,184,000	
33.21.11.2005	5 Mulyorejo	403,991,000	242,394,600	161,596,400	
33.21.11.2006	6 Turirejo	574,834,000	344,900,400	229,933,600	
33.21.11.2007	7 Raji	423,448,000	254,068,800	169,379,200	
33.21.11.2008	8 Cabean	436,376,000	261,825,600	174,550,400	
33.21.11.2009	9 Tempuran	396,304,000	237,782,400	158,521,600	
33.21.11.2010	10 Karangmlati	379,728,000	227,836,800	151,891,200	
33.21.11.2011	11 Katonsari	394,458,000	236,674,800	157,783,200	
33.21.11.2012	12 Kalikondang	451,444,000	270,866,400	180,577,600	
33.21.11.2013	13 Donorojo	402,773,000	241,663,800	161,109,200	
<b>33.21.11 Bonang</b>		<b>9,339,383,000</b>	5,603,629,800	3,735,753,200	
33.21.12.2001	1 Jatimulyo	402,611,000	241,566,600	161,044,400	
33.21.12.2002	2 Krajanbogo	455,409,000	273,245,400	182,163,600	
33.21.12.2003	3 Sukodono	410,553,000	246,331,800	164,221,200	
33.21.12.2004	4 Sumberejo	657,976,000	394,785,600	263,190,400	
33.21.12.2005	5 Kembangan	405,402,000	243,241,200	162,160,800	
33.21.12.2006	6 Karangrejo	470,686,000	282,411,600	188,274,400	
33.21.12.2007	7 Gebangarum	382,131,000	229,278,600	152,852,400	
33.21.12.2008	8 Gebang	435,386,000	261,231,600	174,154,400	
33.21.12.2009	9 Margolinduk	372,201,000	223,320,600	148,880,400	
33.21.12.2010	10 Morodemak	435,682,000	261,409,200	174,272,800	
33.21.12.2011	11 Purworejo	549,215,000	329,529,000	219,686,000	
33.21.12.2012	12 Betahwalang	431,793,000	259,075,800	172,717,200	
33.21.12.2013	13 Serangan	397,206,000	238,323,600	158,882,400	
33.21.12.2014	14 Tridonorejo	504,908,000	302,944,800	201,963,200	
33.21.12.2015	15 Tlogoboyo	399,040,000	239,424,000	159,616,000	
33.21.12.2016	16 Jatirogo	398,496,000	239,097,600	159,398,400	
33.21.12.2017	17 Bonangrejo	389,237,000	233,542,200	155,694,800	
33.21.12.2018	18 Poncoharjo	519,457,000	311,674,200	207,782,800	
33.21.12.2019	19 Wonosari	387,315,000	232,389,000	154,926,000	
33.21.12.2020	20 Jali	417,148,000	250,288,800	166,859,200	
33.21.12.2021	21 Weding	517,531,000	310,518,600	207,012,400	
<b>33.21.11 Wedung</b>		<b>8,095,363,000</b>	4,857,217,800	3,238,145,200	
33.21.12.2001	1 Wedung	574,326,000	344,595,600	229,730,400	
33.21.12.2002	2 Ngawen	349,406,000	209,643,600	139,762,400	
33.21.12.2003	3 Ruwit	386,206,000	231,723,600	154,482,400	
33.21.12.2004	4 Kenduren	479,880,000	287,928,000	191,952,000	
33.21.12.2005	5 Buko	404,605,000	242,763,000	161,842,000	
33.21.12.2006	6 Mandung	336,509,000	201,905,400	134,603,600	
33.21.12.2007	7 Berahan Kulon	364,671,000	218,802,600	145,868,400	
33.21.12.2008	8 Berahan Wetan	555,153,000	333,091,800	222,061,200	
33.21.12.2009	9 Bungo	442,283,000	265,369,800	176,913,200	
33.21.12.2010	10 Tempel	361,059,000	216,635,400	144,423,600	
33.21.12.2011	11 Jetak	380,432,000	228,259,200	152,172,800	
33.21.12.2012	12 Jungsemi	368,739,000	221,243,400	147,495,600	
33.21.12.2013	13 Jungpasir	390,624,000	234,374,400	156,249,600	
33.21.12.2014	14 Mutihwetan	352,994,000	211,796,400	141,197,600	
33.21.12.2015	15 Babalan	441,893,000	265,135,800	176,757,200	

KODE DESA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
33.21.12.2016		16 Mutihkulon	412,754,000	247,652,400	165,101,600
33.21.12.2017		17 Tedunan	375,685,000	225,411,000	150,274,000
33.21.12.2018		18 Kendalasem	359,074,000	215,444,400	143,629,600
33.21.12.2019		19 Kedungmutih	390,057,000	234,034,200	156,022,800
33.21.12.2020		20 Kedungkarang	369,013,000	221,407,800	147,605,200
<b>33.21.14</b>	<b>Kebonagung</b>		<b>5,189,832,000</b>	<b>3,113,899,200</b>	<b>2,075,932,800</b>
33.21.12.2001		1 Pilagwetan	339,370,000	203,622,000	135,748,000
33.21.12.2002		2 Kebonagug	423,967,000	254,380,200	169,586,800
33.21.12.2003		3 Klampok Lor	333,191,000	199,914,600	133,276,400
33.21.12.2004		4 Mijen	355,984,000	213,590,400	142,393,600
33.21.12.2005		5 Werdoyo	410,456,000	246,273,600	164,182,400
33.21.12.2006		6 Mangunrejo	431,874,000	259,124,400	172,749,600
33.21.12.2007		7 Babat	346,405,000	207,843,000	138,562,000
33.21.12.2008		8 Mangunanlor	343,183,000	205,909,800	137,273,200
33.21.12.2009		9 Tlogosih	375,312,000	225,187,200	150,124,800
33.21.12.2010		10 Prigi	341,640,000	204,984,000	136,656,000
33.21.12.2011		11 Sarimulyo	372,247,000	223,348,200	148,898,800
33.21.12.2012		12 Solowire	362,321,000	217,392,600	144,928,400
33.21.12.2013		13 Sokokidul	352,084,000	211,250,400	140,833,600
33.21.12.2014		14 Megonten	401,798,000	241,078,800	160,719,200
<b>JUMLAH</b>			<b>100,668,231,000</b>	60,400,938,600	40,267,292,400

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR